



## **Pengembangan Indeks Modal Manusia melalui Optimalisasi Pendidikan untuk Pembangunan SDM Berkelanjutan (Studi Atas Kebijakan Kemenko PMK)**

Fariz Fata Aqilla<sup>1\*</sup>, Farla Fahiya Anjani<sup>2</sup>, Grace Hanna Yuliarta<sup>3</sup>, Irma Nur Khory<sup>4</sup>,  
Zulkarnain<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Negeri Malang

email: [fariz.fata.2301416@students.um.ac.id](mailto:fariz.fata.2301416@students.um.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran optimalisasi pendidikan dalam pengembangan Indeks Modal Manusia (IMM) dalam kerangka kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan, penelitian ini mengkaji bahan hukum sekunder berupa peraturan, kebijakan pemerintah, serta teori terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan merupakan investasi strategis untuk meningkatkan produktivitas individu dan daya saing bangsa. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan struktural seperti ketimpangan akses pendidikan, terutama di daerah tertinggal, capaian PISA yang rendah, serta lemahnya sinkronisasi kebijakan berbasis data. Meskipun Kemenko PMK telah mengambil langkah progresif melalui koordinasi lintas sektor dan program seperti BOS, PIP, serta revitalisasi vokasi, kesenjangan implementasi, tumpang tindih regulasi pusat-daerah, dan belum terintegrasinya sistem monitoring masih menjadi kendala. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pendidikan tidak hanya meningkatkan IMM, tetapi juga mendukung pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan. Penguatan regulasi, harmonisasi kebijakan, dan penerapan sistem evaluasi berbasis data menjadi kunci pencapaian pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Indeks Modal Manusia, Optimalisasi Pendidikan, Pembangunan Sumber Daya Manusia.

### **Abstract**

*This study analyzes the role of educational optimization in developing the Human Capital Index (HCI) within the policy framework of the Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs (Kemenko PMK). Using normative legal research with statute, conceptual, and policy approaches, the study examines secondary legal materials, including regulations, government policies, and relevant theories. The findings show that education serves as a strategic investment to enhance individual productivity and national competitiveness. However, Indonesia still faces structural challenges such as unequal access, particularly in disadvantaged regions, low PISA scores, and weak data-based policy*





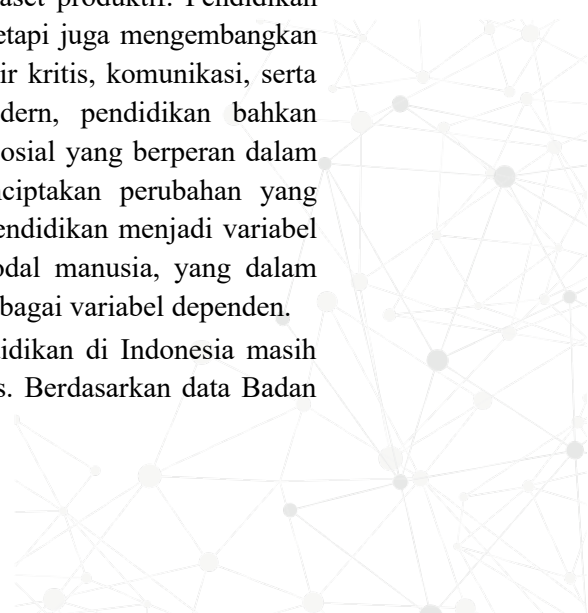
*synchronization. Although Kemenko PMK has initiated progressive steps through cross-sector coordination and programs like BOS, PIP, and vocational revitalization, implementation gaps, regulatory overlap between central and local governments, and lack of integrated monitoring systems remain significant obstacles. The study concludes that optimizing education not only improves HCI but also supports sustainable human resource development. Strengthening regulations, harmonizing policies, and adopting evidence-based evaluation systems are essential to achieving equitable and sustainable development goals in Indonesia. Keywords: Human Capital Index, Educational Optimization, Human Resource Development*

## **Pendahuluan**

Optimalisasi pendidikan merupakan faktor fundamental dalam pengembangan Indeks Modal Manusia (IMM), khususnya dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas individu sejak usia dini hingga memasuki dunia kerja. Dalam perspektif teori modal manusia, pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi strategis yang mampu meningkatkan nilai ekonomi, keterampilan, serta kapasitas produktif seseorang. Hal ini diperkuat oleh hasil Programme for International Student Assessment (PISA) yang menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara anggota OECD (2022). Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), tingkat pendidikan memiliki korelasi positif terhadap produktivitas dan pendapatan tenaga kerja di Indonesia. Investasi pada pendidikan tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan individu, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Dalam perspektif pembangunan manusia, kualitas pendidikan menjadi komponen utama dalam menentukan produktivitas generasi masa depan, di samping kesehatan dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, optimalisasi pendidikan tidak lagi dipandang sebagai sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan sebagai instrumen strategis dalam memperkuat daya saing bangsa melalui peningkatan kualitas modal manusia.

Secara konseptual, hubungan antara pendidikan dan modal manusia terletak pada kemampuannya dalam meningkatkan kualitas individu sebagai aset produktif. Pendidikan tidak hanya berfungsi dalam membentuk kemampuan kognitif, tetapi juga mengembangkan keterampilan non-kognitif seperti kreativitas, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, serta adaptasi terhadap perubahan. Dalam kajian pendidikan modern, pendidikan bahkan diposisikan sebagai agen konservasi, inovasi, dan transformasi sosial yang berperan dalam menjaga nilai-nilai sosial, mendorong pembaruan, serta menciptakan perubahan yang konstruktif dalam masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi pendidikan menjadi variabel kunci yang secara langsung mempengaruhi pengembangan modal manusia, yang dalam penelitian ini direpresentasikan melalui Indeks Modal Manusia sebagai variabel dependen.

Realitas empiris menunjukkan bahwa optimalisasi pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang cukup kompleks. Berdasarkan data Badan



Pusat Statistik (2023), mayoritas tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar dan menengah, sedangkan proporsi lulusan pendidikan tinggi masih berada di bawah 15% dari total angkatan kerja. Selain itu, hasil Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2022 menunjukkan bahwa skor literasi membaca Indonesia berada pada angka 359, matematika 366, dan sains 383, yang masih berada di bawah rata-rata negara anggota OECD yang berada pada kisaran 470–490. Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara capaian pendidikan dan tuntutan kompetensi abad ke-21.

Permasalahan tersebut semakin diperkuat oleh adanya ketimpangan akses pendidikan antarwilayah, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), yang berdampak pada kesenjangan kualitas pendidikan. Keterbatasan infrastruktur pendidikan, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, serta rendahnya akses terhadap teknologi pembelajaran menjadi faktor yang menghambat optimalisasi pendidikan secara menyeluruh. Di sisi lain, tantangan lain seperti tingginya angka *stunting* juga memiliki keterkaitan erat dengan kualitas pendidikan, karena kondisi kesehatan sejak dini akan mempengaruhi kemampuan belajar dan produktivitas individu di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi pendidikan tidak dapat dipisahkan dari dimensi kesehatan dan ekonomi dalam kerangka pembangunan manusia.

Dampak dari belum optimalnya pendidikan tersebut secara langsung tercermin dalam capaian Indeks Modal Manusia Indonesia. Berdasarkan laporan dari World Bank terkait nilai *Human Capital Index*, IMM Indonesia masih berada pada kategori menengah dan belum mampu mencerminkan potensi maksimal produktivitas generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa seorang anak yang lahir di Indonesia belum sepenuhnya dapat mencapai kapasitas produktif optimalnya ketika memasuki usia kerja. Dengan demikian, terdapat hubungan kausal yang kuat antara optimalisasi pendidikan sebagai variabel independen dengan capaian Indeks Modal Manusia sebagai variabel dependen.

Lebih lanjut, optimalisasi pendidikan tidak hanya berdampak pada peningkatan Indeks Modal Manusia, tetapi juga memiliki implikasi strategis terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak pembangunan nasional yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat daya saing bangsa dalam jangka panjang. Dalam perspektif pembangunan abad ke-21, pendidikan menjadi kunci dalam menyiapkan masyarakat yang adaptif terhadap perubahan global, terutama dalam menghadapi transformasi digital dan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Oleh karena itu, optimalisasi pendidikan menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan SDM yang berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif.

Dalam konteks kebijakan nasional, peran pemerintah menjadi sangat krusial dalam mendorong optimalisasi pendidikan sebagai upaya pengembangan modal manusia. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memiliki fungsi strategis dalam mengoordinasikan kebijakan lintas sektor, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan

itu, pengembangan Indeks Modal Manusia sebagaimana diatur dalam Permenko PMK Nomor 3 Tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pengukuran kualitas sumber daya manusia di Indonesia. IMM dirancang sebagai indikator komprehensif yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan produktivitas ekonomi.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas modal manusia dan pertumbuhan ekonomi. Studi-studi tersebut umumnya menekankan pentingnya peningkatan akses pendidikan, kualitas pembelajaran, serta keterkaitan antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek parsial, seperti capaian pendidikan formal atau dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, dan belum secara komprehensif mengkaji keterkaitan antara optimalisasi pendidikan dengan pengembangan Indeks Modal Manusia dalam kerangka kebijakan terintegrasi lintas sektor.

Disamping itu, kajian mengenai implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan yang ada cenderung lebih berorientasi pada peningkatan akses pendidikan, seperti angka partisipasi sekolah, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Integrasi antara pendidikan formal dan nonformal juga masih belum optimal dalam mendukung pengembangan keterampilan praktis masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di lapangan, khususnya dalam konteks optimalisasi pendidikan sebagai faktor utama dalam pengembangan Indeks Modal Manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang cukup jelas. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada hubungan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi atau capaian pendidikan formal secara parsial, tanpa mengkaji keterkaitannya secara langsung dengan Indeks Modal Manusia sebagai indikator komprehensif. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum banyak mengintegrasikan analisis pendidikan dalam kerangka kebijakan lintas sektor yang melibatkan dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara simultan, khususnya dalam konteks kebijakan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa kajian mengenai optimalisasi pendidikan dalam pengembangan Indeks Modal Manusia masih terbatas pada pendekatan sektoral dan belum menyentuh aspek integratif kebijakan secara menyeluruh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran optimalisasi pendidikan dalam pengembangan Indeks Modal Manusia. Fokus penelitian diarahkan pada hubungan antara pendidikan sebagai variabel independen dengan Indeks Modal Manusia sebagai variabel dependen dalam kerangka kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi optimalisasi pendidikan terhadap pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

## Metode Penelitian



Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif atau kepustakaan merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang bertujuan menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini berfokus pada kajian bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pengembangan Indeks Modal Manusia melalui optimalisasi pendidikan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan. Bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta teori dan doktrin yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh bahan penunjang berupa data sekunder dari laporan resmi pemerintah dan literatur ilmiah untuk memperkuat analisis kebijakan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, baik berupa kebijakan, laporan resmi, maupun literatur ilmiah.

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analitis dengan fokus pada kajian terhadap tujuan hukum, aturan hukum, serta norma-norma yang berkaitan dengan optimalisasi pendidikan sebagai instrumen pengembangan Indeks Modal Manusia. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap kebijakan Kemenko PMK, termasuk bagaimana optimalisasi pendidikan berbasis data digunakan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan Indeks Modal Manusia (IMM), serta keterkaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai tantangan serta strategi dalam implementasi kebijakan tersebut.

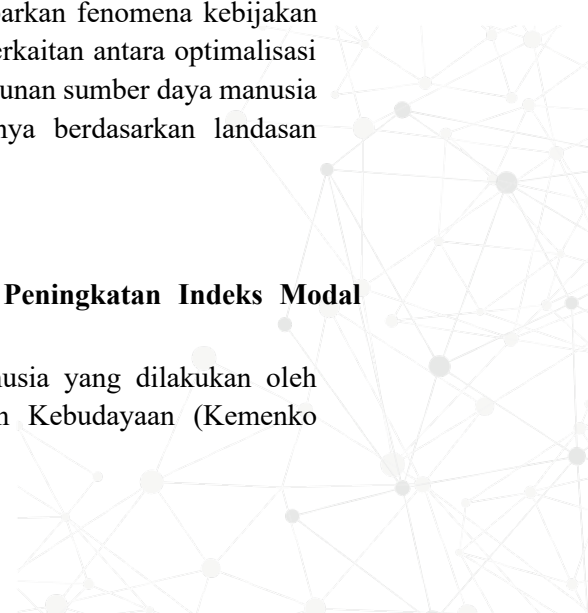
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kebijakan (policy approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep Indeks Modal Manusia, optimalisasi pendidikan, serta pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, pendekatan kebijakan digunakan untuk menganalisis arah, implementasi, serta strategi kebijakan Kemenko PMK dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena kebijakan secara sistematis, tetapi juga menganalisis secara mendalam keterkaitan antara optimalisasi pendidikan, pengembangan Indeks Modal Manusia, dan pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan, termasuk tantangan dan strategi implementasinya berdasarkan landasan hukum dan teori yang relevan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Sinkronisasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Data dalam Peningkatan Indeks Modal Manusia**

Pendekatan kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko



PMK) menunjukkan pergeseran menuju kebijakan berbasis data. Dalam konteks ini, data tidak hanya digunakan sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai dasar dalam proses sinkronisasi kebijakan lintas sektor, khususnya di bidang pendidikan sebagai komponen utama dalam pengembangan Indeks Modal Manusia (IMM). Salah satu indikator yang digunakan adalah hasil Programme for International Student Assessment (PISA) yang memberikan gambaran mengenai capaian literasi, numerasi, dan sains peserta didik Indonesia dalam konteks global. Namun demikian, pemanfaatan data tersebut masih cenderung berhenti pada tahap identifikasi masalah dan belum sepenuhnya diikuti dengan intervensi kebijakan yang terukur dan konsisten.

Dalam praktiknya, Kemenko PMK berperan dalam mengintegrasikan berbagai indikator pendidikan seperti angka partisipasi sekolah, angka putus sekolah, serta rata-rata lama sekolah ke dalam kerangka kebijakan lintas sektor. Peran ini menunjukkan adanya upaya untuk menyelaraskan program antar kementerian agar memiliki kontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi, sinkronisasi yang dilakukan masih menghadapi keterbatasan dalam hal integrasi data antar lembaga. Perbedaan sistem pengukuran, keterlambatan pembaruan data, serta kurangnya interoperabilitas data menjadi kendala yang menyebabkan kebijakan belum sepenuhnya responsif terhadap kondisi riil di lapangan.

Meskipun berbagai program pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah diintegrasikan dalam kerangka kebijakan, efektivitasnya dalam meningkatkan Indeks Modal Manusia masih belum optimal. Program-program tersebut lebih banyak berfokus pada peningkatan akses pendidikan, namun belum secara signifikan menyentuh aspek kualitas pembelajaran yang menjadi faktor utama dalam peningkatan kompetensi. Hal ini terlihat dari capaian PISA Indonesia yang masih berada di bawah rata-rata OECD, meskipun intervensi kebijakan telah dilakukan secara masif. Kondisi ini menunjukkan bahwa sinkronisasi kebijakan belum sepenuhnya mampu menjembatani antara peningkatan akses dan peningkatan kualitas pendidikan.

Di sisi lain, keberadaan regulasi seperti Permenko PMK Nomor 3 Tahun 2025 tentang Indeks Modal Manusia seharusnya menjadi instrumen kunci dalam memperkuat integrasi kebijakan berbasis data. Regulasi ini telah menetapkan indikator yang lebih komprehensif dalam mengukur kualitas sumber daya manusia. Namun, dalam implementasinya, pemanfaatan indikator tersebut dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya keterkaitan yang kuat antara hasil pengukuran IMM dengan penyesuaian program pendidikan secara konkret di tingkat implementasi.

Dengan demikian, sinkronisasi kebijakan pendidikan berbasis data yang dilakukan oleh Kemenko PMK telah menunjukkan arah yang tepat, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek integrasi data, efektivitas program, dan pemanfaatan indikator secara operasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi pendidikan dalam kerangka peningkatan Indeks Modal Manusia tidak hanya memerlukan ketersediaan data, tetapi juga

kemampuan untuk mengolah, mengintegrasikan, dan menerjemahkan data tersebut menjadi kebijakan yang berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran dan produktivitas sumber daya manusia.

### **Optimalisasi Pendidikan Sebagai Strategi Peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM)**

Dalam perspektif yuridis normatif, kebijakan koordinasi pembangunan manusia tidak lagi dipandang sekadar sebagai pemenuhan kewajiban administratif pelayanan publik, melainkan secara doktrinal telah bergeser menjadi strategi investasi modal manusia (human capital investment). Melalui kacamata teori human capital, setiap upaya optimalisasi pendidikan diposisikan sebagai bentuk belanja modal negara (capital expenditure) yang bertujuan menghasilkan imbal hasil (return) berupa produktivitas nasional di masa depan (Becker, 1993). Upaya sinkronisasi pada jenjang pendidikan vokasi, misalnya, secara konseptual dirancang untuk mengatasi kesenjangan kompetensi agar relevan dengan kebutuhan pasar kerja (link and match). Sementara itu, penguatan pada fase pendidikan usia dini diletakkan sebagai fondasi hukum dan sosial yang krusial untuk mencegah kegagalan pengembangan kapasitas individu pada tahap kehidupan berikutnya. Dengan demikian, arah kebijakan kementerian koordinator secara teoritis memosisikan anggaran pendidikan sebagai investasi strategis yang menentukan daya saing bangsa, bukan sekadar beban biaya anggaran negara.

Lebih lanjut, terdapat upaya sistematis untuk mengintegrasikan indikator-indikator dalam Indeks Modal Manusia (IMM) ke dalam norma-norma pendidikan nasional melalui fungsi sinkronisasi lintas sektoral (World Bank, 2020). Secara konseptual, integrasi ini dilakukan dengan mensinkronkan antara komponen kuantitas, yang berkaitan dengan durasi dan angka harapan sekolah, dengan komponen kualitas yang diukur melalui hasil pembelajaran dan skor tes standar. Norma pendidikan dalam fungsi pengendalian ini tidak hanya diarahkan untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan akses sekolah yang merata melalui bantuan sosial pendidikan, tetapi juga didorong untuk memenuhi standar mutu melalui implementasi Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, dan standarisasi kualitas tenaga pendidik. Dalam hal ini, peran koordinasi berfungsi sebagai integrator kebijakan yang memastikan bahwa output sistem pendidikan memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kompetensi nyata, yang pada akhirnya diproyeksikan mampu mendongkrak skor Indeks Modal Manusia (IMM) Indonesia di tingkat global sebagai cerminan dari potensi produktivitas generasi mendatang.

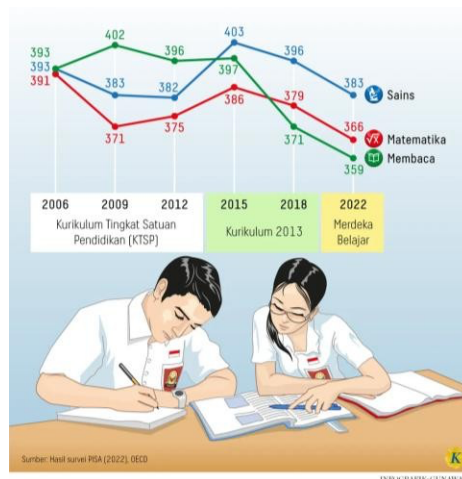
Pada akhirnya, optimalisasi pendidikan sebagai instrumen kebijakan memiliki korelasi yang sangat kuat dengan perwujudan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Secara teoritis, pendidikan yang dioptimalkan berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ketahanan (resilience) dan adaptabilitas SDM dalam menghadapi disrupsi zaman, seperti transformasi digital dan transisi menuju ekonomi hijau (UNESCO, 2021). Pendidikan tidak hanya individu dengan keterampilan teknis sesaat, tetapi juga menanamkan kemampuan belajar sepanjang hayat (lifelong learning) dan fleksibilitas kognitif agar individu mampu melakukan penyesuaian keahlian (upskilling) secara mandiri. Melalui penguatan aspek karakter dan literasi yang dicanangkan dalam kebijakan



koordinasi, pembangunan SDM diarahkan untuk menjadi lebih tangguh dan adaptif. Hal ini menjadi esensial agar transisi ekonomi di masa depan tidak menimbulkan pengangguran struktural, melainkan menciptakan kesinambungan kesejahteraan antar generasi yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (Marzuki, 2021).

### Analisis Kebijakan Implementasi dan Strategi Berbasis Data

Sinkronisasi kebijakan pendidikan di Indonesia menjadi elemen penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam rangka mencapai Indeks Modal Manusia (IMM). Dalam pelaksanaannya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memiliki peran strategis sebagai koordinator lintas sektor yang memastikan harmonisasi kebijakan antar kementerian, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan kementerian terkait lainnya (Kemenko PMK, 2023).



Gambar 1. Skor PISA siswa Indonesia

Upaya sinkronisasi tersebut semakin mengedepankan pendekatan berbasis data, salah satunya melalui pemanfaatan hasil Programme for International Student Assessment (PISA) sebagai indikator dalam mengevaluasi mutu pendidikan, yang telah diakui secara global sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan pendidikan (Breakspear, 2012; OECD, 2019). Data PISA dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan peserta didik, terutama dalam aspek literasi, numerasi, dan sains, yang kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan strategis (Pratiwi, 2019). Dalam konteks tersebut, Kemenko PMK berperan dalam menyelaraskan program lintas kementerian serta memastikan kebijakan nasional tetap sejalan dengan standar global, mengingat pentingnya koordinasi dalam menciptakan efektivitas dan koherensi tata kelola pendidikan (OECD, 2015). Dengan demikian, diharapkan tercipta kebijakan pendidikan yang lebih terpadu, efektif, dan berkelanjutan. Implementasi nyata dari sinkronisasi kebijakan ini terlihat dalam integrasi



berbagai program seperti BOS, PIP, dan KIP-Kuliah yang dirancang untuk saling melengkapi dalam mendukung keberlangsungan pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Intervensi kebijakan juga mulai diarahkan pada wilayah dengan kerentanan tinggi seperti daerah 3T.

Efektivitas fungsi koordinasi dalam tata kelola pembangunan manusia sangat ditentukan oleh kemampuan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menjalankan peran utamanya, yaitu KSP (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian). Implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 merupakan salah satu bukti nyata efektivitas fungsi koordinasi yang dijalankan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Revitalisasi pendidikan di Indonesia merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kebijakan ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya keterkaitan (link and match) antara pendidikan dan industri. Peraturan ini menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi guna meningkatkan keselarasan antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Koordinasi yang baik mampu meningkatkan efisiensi pelaksanaan program serta memperkuat pencapaian tujuan kebijakan.

Strategi penguatan Indeks Modal Manusia (IMM) tidak dapat dilepaskan dari tantangan ketimpangan pengembangan sumber daya manusia yang masih cukup tajam di Indonesia. Kesenjangan tersebut terlihat jelas antara wilayah pulau jawa dan luar jawa, serta antara kawasan perkotaan dan daerah 3T. wilayah perkotaan dan pulau jawa umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, sementara daerah 3T masih menghadapi keterbatasan akses serta kualitas layanan yang belum merata (Badan Pusat Statistik, 2023). Kondisi ini berdampak pada rendahnya capaian kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut, yang akhirnya memperlebar kesenjangan pembangunan nasional (World Bank, 2020). Laporan Programme for International Student Assessment menunjukkan adanya disparitas kemampuan literasi dan numerasi antar wilayah di Indonesia, yang semakin menegaskan adanya ketimpangan kualitas pendidikan (OECD, 2019). Strategi mencakup reformasi kurikulum, peningkatan kompetensi pendidik, pemanfaatan teknologi, dan perbaikan infrastruktur secara merata.

### **Tantangan Normatif dan Strategis dalam Pembangunan SDM Berkelanjutan**

Tantangan normatif dan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkelanjutan di Indonesia tidak hanya merefleksikan persoalan teknis, tetapi juga menunjukkan adanya problem struktural dalam tata kelola kebijakan publik. Dalam perspektif multi-level governance, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu hambatan utama yang berdampak pada fragmentasi kebijakan. Desentralisasi yang pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik justru menghasilkan variasi implementasi yang tinggi ketika tidak diimbangi dengan mekanisme koordinasi yang kuat dan terinstitusionalisasi. Pemerintah pusat berperan dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, sementara pemerintah daerah memiliki

otonomi dalam implementasi. Namun, ketidaksinkronan regulasi dan disparitas kapasitas kelembagaan antar daerah menyebabkan inkonsistensi standar mutu pendidikan serta menghambat konvergensi indikator pembangunan manusia secara nasional. Dengan demikian, permasalahan utama terletak pada lemahnya integrasi tata kelola lintas level pemerintahan, bukan semata pada desain desentralisasi itu sendiri.

Lebih lanjut, analisis terhadap kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih cenderung bersifat normatif dan apresiatif, namun belum secara kritis mengevaluasi keterbatasan desain regulasi yang mendasarinya. Dalam kerangka policy coordination, peran Kemenko PMK sebagai koordinator lintas sektor secara formal telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020. Namun demikian, secara substantif, fungsi koordinatif tersebut masih menghadapi keterbatasan dalam hal daya paksa (enforcement capacity). Kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat rekomendatif dan tidak memiliki kekuatan mengikat yang cukup terhadap kementerian/lembaga teknis. Kondisi ini mencerminkan fenomena coordination failure, di mana kegagalan bukan terletak pada ketiadaan kebijakan, melainkan pada lemahnya mekanisme institusional untuk memastikan kepatuhan dan integrasi kebijakan lintas sektor.

Di sisi lain, kelemahan regulasi juga terlihat dalam pengaturan hubungan kewenangan pusat dan daerah yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kompleksitas desentralisasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan kerangka pembagian kewenangan, implementasinya masih menyisakan ruang multitafsir yang berkontribusi terhadap disharmoni kebijakan, khususnya dalam sektor pendidikan dan vokasi. Studi empiris menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia masih menghadapi tantangan koordinasi vertikal dan horizontal yang signifikan, sehingga menghasilkan variasi kualitas layanan publik antar daerah (OECD, 2021; World Bank, 2020). Dalam konteks ini, Kemenko PMK belum sepenuhnya mampu berfungsi sebagai policy integrator yang efektif untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Di samping itu, terdapat kesenjangan implementasi (implementation gap) yang cukup signifikan antara desain kebijakan dan realitas di lapangan. Meskipun kebijakan pembangunan SDM telah dirumuskan secara komprehensif, praktiknya masih menunjukkan disparitas akses dan kualitas pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Fenomena skill mismatch juga mengindikasikan bahwa sistem pendidikan belum responsif terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja. Indikator pembangunan manusia yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan produktivitas tenaga kerja belum mencapai capaian optimal, meskipun berbagai intervensi kebijakan telah dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya policy failure yang bersumber dari lemahnya kapasitas implementasi, kurangnya integrasi lintas sektor, serta belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi.

Kelemahan lain yang tidak kalah penting adalah belum terbangunnya sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi secara nasional. Dalam kerangka evidence-based policy, ketersediaan data yang terintegrasi menjadi prasyarat utama bagi efektivitas kebijakan. Namun demikian, meskipun telah terdapat upaya penguatan melalui RPJMN

2020–2024, integrasi data lintas sektor masih menghadapi kendala interoperabilitas, fragmentasi sistem informasi, dan inkonsistensi indikator (Bappenas, 2019, 2022). Akibatnya, proses evaluasi kebijakan cenderung bersifat sektoral dan tidak mampu memberikan gambaran komprehensif terhadap capaian pembangunan SDM.

Dalam merespons berbagai permasalahan tersebut, diperlukan strategi reformasi kebijakan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Penguatan regulasi melalui harmonisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi langkah krusial untuk mengurangi konflik kewenangan. Selain itu, optimalisasi peran Kemenko PMK perlu didukung oleh penguatan mandat kelembagaan yang tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi juga memiliki daya dorong implementatif. Pendekatan *whole-of-government* menjadi penting untuk memastikan integrasi lintas sektor yang lebih efektif. Di sisi lain, penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data harus menjadi prioritas untuk mendukung kebijakan yang adaptif dan responsif. Upaya peningkatan kualitas SDM juga perlu diarahkan pada penguatan keterkaitan antara pendidikan dan kebutuhan industri melalui program vokasi, reskilling, dan upskilling. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan SDM berkelanjutan sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam mengatasi kegagalan koordinasi, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta memastikan integrasi kebijakan yang berbasis bukti.

## Simpulan

Pendidikan memiliki peranan utama dalam peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM), karena menjadi dasar terbentuknya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Optimalisasi pendidikan juga menjadi faktor utama dalam meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM), yang berperan penting dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan. Pendidikan tidak hanya berfokus pada perluasan akses, tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan mutu serta kesesuaian dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja.

Kebijakan yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK menunjukkan arah yang progresif melalui pendekatan berbasis data dan sinkronisasi lintas sektor, khususnya dengan memanfaatkan indikator seperti PISA serta integrasi program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun, masih terdapat berbagai tantangan, terutama terkait kesenjangan akses, ketimpangan kualitas antarwilayah, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, penguatan regulasi, harmonisasi kebijakan, serta penerapan sistem evaluasi berbasis data menjadi kunci agar pembangunan SDM dapat berjalan efektif, merata, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## Ucapan Terima Kasih

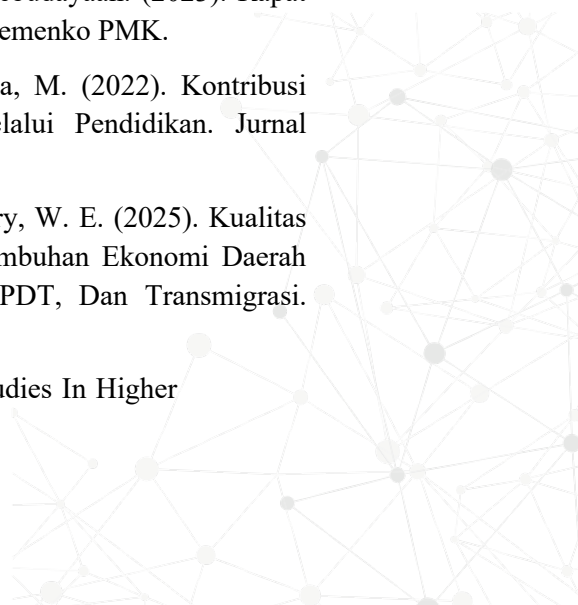
Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh anggota kelompok yang telah bekerja sama dan berkontribusi dalam penyusunan serta penyelesaian artikel penelitian ini. Kerja sama, dedikasi, dan komitmen yang diberikan menjadi faktor penting dalam tersusunnya artikel ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko



PMK) atas dukungan dan fasilitas selama proses penelitian berlangsung. Selain itu, apresiasi yang setinggi-tingginya diberikan kepada dosen pembimbing lapangan yakni Bapak Dr. Zulkarnain M.Pd, M.Si serta dosen pendamping Bapak Prof. Asep Sunandar S.Pd, M.AP atas bimbingan, arahan, dan masukan yang konstruktif sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, D. (2026). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Kemiskinan Multidimensi Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam (2015-2024) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Arifin, A. S. (2023). Human Capital Investment: Meningkatkan Daya Saing Global Melalui Investasi Pendidikan. *Jurnal Education And Development*, 11(2), 174-179.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024*. Bappenas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2022). *Laporan evaluasi pembangunan nasional*. Bappenas.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (3rd Edition). Chicago: University of Chicago Press.
- Breakspear, S. (2012). *The Policy Impact Of PISA: An Exploration Of The Normative Effects Of International Benchmarking*. OECD Publishing.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan. (2025). *Orientasi Kepala Daerah: Fokus Pembangunan SDM*.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan. (2025). *Komitmen Pengembangan SDM Unggul Di Semua Lini Pendidikan*.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan. (2023). *Rapat Koordinasi Sinkronisasi Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Kemenko PMK.
- Kholifaturrohmah, R., Floresti, D. A., Mayasari, V., & Rosiana, M. (2022). Kontribusi Human Capital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pendidikan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 24(4), 85-93.
- Ladiesya, B., Rafsanjani, M., Therecia, B., Al Baihaqi, Y., & Sary, W. E. (2025). Kualitas Sumber Daya Manusia Sebagai Faktor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tertinggal: Studi Atas Kebijakan Kementerian Desa, PDT, Dan Transmigrasi. *CAUSA Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(10).
- Marginson, S. (2019). *Limitations Of Human Capital Theory*. *Studies In Higher*





- Education, 44(2). Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Maulana, A. I., Nugraha, T. U. P., Tarigan, M., & Carsiwan. (2026). Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Bidang Pendidikan: Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 2(4), 1207–1212.
- OECD. (2015). *Education Policy Outlook 2015: Making Reforms Happen*. OECD Publishing.
- OECD. (2019). *PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know And Can Do*. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Multi-level governance studies: Indonesia*. OECD Publishing.
- Pratiwi, I. (2019). Efek Program Programme For International Student Assessment Terhadap Kurikulum Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 4(1), 51–71.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*.
- Sari, A. I. C., Fithah, Z., & Tukiran, M. (2022). Pengaruh Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *JABE (Journal Of Applied Business And Economic)*, 9(2), 127-136.
- Suhardi. (2021). *Hukum Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sui-Ni, N. (2023). Peran Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Menyediakan Pendidikan Dasar Bermutu Untuk Mewujudkan Visi Indonesia 2045.
- Tasmilah, T., Pratomo, D. S., & Syafitri, W. (2023). Pengaruh Modal Manusia Terhadap Transisi Tenaga Kerja Formal Menjadi Informal Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 23(1), 5.
- UNESCO. (2021). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract For Education*. Paris: UNESCO Publishing.
- World Bank. (2020). *The Indonesia Human Capital Index 2020 Update*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2020). *Indonesia public expenditure review: Spending for better results*.
- World Bank. Yunus, A. A. M. A. P., & Jamar, N. (2026). Analisis Modal Manusia Dan Pekerja Informal Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Di Indonesia. *RIGGS: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4(4), 696-703.

